



buletin

# Parlementaria

Nomor 959/III/V/2017 • Mei 2017

**Ketua DPR RI Ucapkan  
Selamat Terpilihnya Macron  
Sebagai Presiden Perancis**

**Banyak Sarpras  
Pendidikan Tanah Air  
Tidak Layak**



**Butuh Regulasi dan  
Sinergi Kuat  
Bangun  
Infrastruktur  
Kaltara**

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN

# Butuh Regulasi dan Sinergi Kuat Bangun Infrastruktur Kaltara

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Sigit Sosiantomo mengatakan, butuh regulasi khusus untuk pembangunan infrastruktur di Kaltara, mengingat pembangunan infrastruktur tidak lepas dari pembangunan desanya. Dana desa menjadi hal yang penting juga, agar *mindset* pembangunan desa yang ada di Pulau Jawa dan Kaltara tidak disamaratakan.

“Misalnya, dukungan terhadap infrastruktur desa itu, kan, belum terlalu krusial ya. Justru yang terpenting itu pembangunan SDM Desa. Jadi, bagaimana persentase untuk pembangunan SDM Desa lebih tinggi daripada infrastruktur dan ini butuh regulasi. Regulasi kita sering disamaratakan. Tadi disinggung oleh Pak Gubernur, selalu disamaratakan antara Jawa dan Kalimantan. Nanti kita akan bicarakan dengan Menteri Desa untuk membuat regulasi yang khas sesuai dengan kondisi daerah yang membutuhkan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.

Selain pembangunan infrastruktur di Kaltara yang masih menjadi PR besar, hal lainnya yang menjadi perhatian mendalam adalah penanganan bencana dan rusaknya

jalan di Kaltara. Sigit meminta pihak Bina Marga dan Pekerjaan Umum untuk melakukan inspeksi jalan secara rutin dan sungguh-sungguh.

Musuh utama jalan adalah hujan yang selalu membuat rusak dan longsor. Apalagi, musim kemarau belum tiba. Di Jawa juga kondisinya sama. “Nah kesiapan tim teknis dari teman-teman Bina Marga itu penting. Oleh karena itu, mengetahui secara dini ada longsor sangat penting. Saya berharap *contract long segment* ini bukan justru jadi penghambat memperbaiki jalan yang rusak dan longsor dalam skala kecil,” papar politisi PKS ini.

Sigit juga berharap adanya *contract long segment* dapat dengan teliti dan detail menyelesaikan persoalan seperti jalan rusak

atau jalan berpotensi longsor, agar sigap untuk segera diatasi dan tidak semakin banyak di masa mendatang. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie berharap dengan adanya kunjungan kerja komisi V DPR RI ini dapat menunjukkan langkah konkret dalam pembangunan infrastruktur di provinsinya.

“Kami berharap dengan adanya kunjungan kerja ini ada tindak lanjut yang konkret dalam penentuan politik anggaran. Kita tidak menuntut banyak tetapi yang wajar dan proporsional saja. Kita juga memahami kemampuan keuangan negara. Tapi, paling tidak daerah-daerah seperti Kaltara ini, kan, masuk salah satu penyumbang keuangan negara juga dari sumber daya alamnya. Ini patut diperhatikan,” imbuh sang gubernur di kantor gubernur, Tanjung Selor, Kaltara. ■

(redy), Fotomadya/hr



Tim Kunjungan Komisi V DPR RI Ke Provinsi Kaltara dipimpin Wakil Ketua Sigit Sosiantomo



# Sikap Pemerintah Terhadap HTI Patut Diapresiasi

Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, keputusan pemerintah dalam menyikapi keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) patut diapresiasi. Menurutnya, keputusan untuk membubarkan organisasi HTI sebagai Ormas sudah didasari atas pertimbangan yang matang.



Ketua DPR RI, Setya Novanto

“Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, tentu saja Indonesia memiliki pedoman, aturan dan dasar negara yang disepakati bersama dan menjadi payung melingkupi sistem sosial dan politik,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Parlemen, Selasa (9/5).

Politisi F-PG itu menekankan, organisasi-organisasi yang diduga menyimpang dan memiliki potensi mengancam persatuan dan kesatuan, kebhinnekaan, keutuhan bangsa dibawah NKRI, patut diberi tindakan yang tegas. Tentu dengan

mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORMAS.

Atas dasar itulah, masih kata Novanto, keberadaan seluruh ormas yang memiliki badan hukum harus tunduk dan patuh pada aturan. Sebaliknya, mereka yang menyimpang harus ditindak tegas demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kita tentu tidak ingin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terancam karena perbedaan pemahaman. Kita juga tidak ingin dasar negara yang telah diperjuangkan oleh para pendiri republik diselewengkan dan dinafikan," imbuh Novanto.

Situasi dan kondisi nasional yang stabil dan kondusif harus disadari bahwa hal itu didukung oleh semua pihak, termasuk ormas-ormas yang berbadan hukum. Tujuannya tidak lain untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan menjamin keberlangsungan hidup rakyat.

Saya mendukung sepenuhnya sikap pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap ormas HTI. Selebihnya, kita menyerahkan sepenuhnya proses tersebut diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, agar keputusan tersebut memiliki legitimasi yuridis dan tidak menjadi polemik di mata masyarakat," tegas politisi asal dapil NTT itu. ■

(sif/sc), Foto: Jaka/hr

- PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari
- ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**  
Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,  
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
- ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharjanto
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



## PENERBITAN

**Pimpinan Penerbitan**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

**Penanggung Jawab Produksi**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**Staf Produksi**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

**Distribusi dan Sirkulasi**  
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

**Koordinator**  
Mujiono

**Staf Distribusi dan Sirkulasi**  
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,  
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

# Ketua DPR RI Ucapkan Selamat Terpilihnya Macron Sebagai Presiden Perancis

Rakyat Perancis baru saja memiliki pemimpin baru. Emmanuel Macron terpilih sebagai Presiden Perancis menggantikan Francois Hollande. Ketua DPR RI Setya Novanto menilai, terpilihnya Marcon menjadi sejarah tersendiri bagi Perancis dan dunia. Sebanyak 65 persen suara pemilih cukup membuktikan bahwa Macron mampu memberi harapan, ide, pemikiran dan gagasan baru tentang Perancis, Uni Eropa dan dunia masa depan.



Ketua DPR RI, Setya Novanto

“Selamat atas terpilihnya Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis. Selamat bekerja, semoga mampu menghadirkan masa depan hubungan Indonesia dan Perancis yang lebih baik di masa yang akan datang,” kata Novanto, dalam rilis yang diterima Parleментарia, Senin (8/5).

Novanto mengaku terkesan atas rasionalitas pemilih yang telah menitip harapan pada keberlangsungan hubungan yang baik antar negara dan antar warga negara di dunia. Apalagi diketahui, ide-ide dan gagasan Macron sangat populis, tidak identik dengan kanan maupun kiri yang selama ini akrab terdengar dalam perpolitikan Eropa.

“Macron mampu memadukan saripati yang baik dari kedua ekstrim tersebut, mengakomodasi berbagai kepentingan Eropa dan kepentingan globalisasi namun tidak kehilangan ketegasan pada paham-paham radikal yang berpotensi memecah belah dan

mendestruksi kehidupan masyarakat,” analisa Novanto.

Kemenangan Macron membuktikan, tambah politisi F-PG itu, bahwa rakyat dunia di alam demokrasi, khususnya Perancis begitu dewasa dan matang dalam memahami kondisi globalisasi dan kepentingan yang mengakomodasi berbagai perbedaan.

“Sejarah baru telah tercipta, dan akan diawali oleh Macron. Perbedaan bukanlah musuh, melainkan dikelola sebagai kekuatan bersama,” optimis Novanto.

Sebagai negara besar dan demokratis, Indonesia tentu memiliki tempat penting bagi Perancis. Sebagai negara besar, Indonesia mampu menjadi contoh bagi upaya-upaya pengembangan kehidupan berdemokrasi, mengelola perbedaan dengan baik dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda tanpa menimbulkan gejala signifikan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

“Sama halnya dengan bangsa kita, Indonesia adalah negara dengan kebhinekaan yang unik, namun tetap bertahan di bawah panji-panji persatuan dan kesatuan. Meski globalisasi melahirkan berbagai ekses-ekses bagi budaya dan ideologi, Indonesia mampu menghadirkan Pancasila sebagai dasar dan filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Novanto.

Presiden Joko Widodo pun selalu memiliki ide-ide segar tentang masa depan, tentang kehidupan yang aman, damai, sejuk serta eksistensi negara

yang besar, namun tetap menanamkan benih-benih kesatuan dan persatuan di ladang keberagaman, sehingga kebhinekaan justru menjadi pemersatu sekaligus kekuatan di dalam NKRI.

“Karena itu, saya memandang ide dan gagasan tersebut sejalan dengan apa yang sedang dikembangkan di negara-negara Eropa saat ini. Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo, mampu menjadi contoh yang baik dan preseden yang sempurna tentang bagaimana menjalankan nilai-nilai demokrasi, bahkan di negara yang memiliki pemeluk Islam mayoritas di dunia,” tutup politisi asal dapil NTT itu. ■



(sf/sc)/foto.jakarta.fhr.

# Al-Quran Pedoman Hidup Menuju Kebenaran

Tidak sekadar kitab suci, Al Quran jadi pedoman kehidupan manusia pada kebenaran. Generasi bangsa ini pun perlu di didik dengan pengetahuan Al Quran.

Demikian terungkap saat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima kunjungan Yayasan Wakaf Rumah Quran Violet di ruang pertemuan wakil ketua, Gedung Nusantara III, DPR RI. Fahri mengapresiasi gerakan ini, karena telah berkontribusi memberikan penyadaran bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan pedoman hidup yang tidak ada keraguan di dalamnya.

Dia juga menyampaikan pentingnya mendidik generasi bangsa dengan pengetahuan Al-Quran. Politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini bahwa berpedoman pada esensi ajaran Al-Quran mengantarkan kehidupan manusia pada kebenaran.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah

"Mendidiknya dengan kalimat-kalimat kebenaran, sehingga dia betul-betul tumbuh menjadi manusia yang utuh dan tumbuh tidak memiliki jarak dengan kebenaran, dan gampang

menerima kebenaran, mudah menyerap kebenaran, dan mudah berpihak pada kebenaran. Setelah kebenaran itu diyakini, dikatakan dengan lantang menjadi karakternya dalam kehidupan," papar Fahri Kamis (4/5) sore.

Dia juga mengatakan ingin memberikan perhatian dan menjalin persahabatan, agar ikhtiyar mulia ini bisa terus berjalan berkembang secara masif. "Sehingga Rumah Quran Violet menghampiri semua rumah tangga Indonesia, khususnya rumah tangga kaum muslimin," ujar Fahri.

Ditegaskan Fahri, mendidik generasi bangsa dengan berpedoman pada Al-Quran mulai dari kecil menjadi keharusan sejarah. Karena menurutnya kemajuan teknologi tidak selamanya mengantarkan generasi bangsa pada hal positif. Oleh sebab itu kemajuan zaman wajib dibarengi dengan pengetahuan esensi Al-Quran.

"Mengisi jiwa anak-anak kita dengan Al Quran adalah keharusan sejarah. Kita tahu teknologi ini sangat mengganggu. Teknologi kita sangat menggoyah. Sekarang teknologi ada di tangan manusia. Bahkan, sebentar lagi ada terobosan teknologi ada di dalam tubuh manusia. Nanti berita tidak akan dicari lagi, karena dia akan berbisik ke telinga orang. Eksperimen seperti ini sudah dilakukan," ungkap Fahri.

Yayasan Wakaf Rumah Quran Violet Indonesia merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial-religi. Bercita-cita untuk memberantas buta huruf Al Quran dan mencetak generasi muda Indonesia yang cerdas bersama Al Quran. ■

(leko). Foto: Jayadi/hr

# Georgia Ajak Indonesia Bentuk Grup Kejasama Bilateral

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Georgia Y.M David Jalagani dan Duta Besar Georgia H.E. MR. Zurab Aleksidze di Ruang Tamu Pimpinan, Nusantara III. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak akan mempererat hubungan bilateral dengan kerja sama dalam beberapa sektor dan saling memberikan dukungan di dalam lembaga-lembaga Internasional.

"Kedua negara ke depan akan saling kerjasama dan saling mendukung untuk posisi-posisi di lembaga-lembaga Internasional, baik di PBB ataupun di negara-negara lain, lembaga multilateral lain," ujar Fadli, Jumat (5/5).

Di mata Georgia, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis, negara ini ingin hubungan dengan Indonesia terjalin kuat, termasuk juga dengan negara-negara ASEAN. Meskipun luas negara Georgia kecil, namun keunggulan negara ini bagi Indonesia bisa menjadi 'jendela' ke negara-negara kawasan Eks Uni Soviet dan juga ke Eropa.

"Mereka juga menyampaikan dari Parlemen Georgia menginginkan semacam grup kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Georgia. Dan harapan itu saya kira sangat masuk akal. Minggu depan saya melakukan kunjungan muhibah ke Georgia. Sehingga bisa memperkuat hubungan bilateral kedua negara," papar Fahri.

Hal lain yang bisa menjadi profit buat kedua negara adalah sektor pariwisata. Georgia memiliki turis sekitar 6 koma setengah juta. Negara yang punya luas tidak terlalu besar tapi bisa mendatangkan turis cukup banyak. "Yang lain yang bisa kita *develop* adalah *tourism*, saya kira kita juga berharap ada turis-turis dari Georgia yang datang ke Indonesia," ungkap Fadli. ■

(leko.mp). Foto:wan armanias/hr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon bertukar cinderamata dengan Wakil Menteri Luar Negeri Georgia Y.M David

## Bali Masih Menjadi Tujuan Investasi Menarik

Bali masih menjadi daya tarik investasi di Tanah Air. Target pembangunan makro regional Bali secara umum jauh diatas target pembangunan makro ekonomi nasional. Bali juga didukung oleh penyediaan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan yang memadai.



Tim Kunker Komisi XI DPR RI berfoto bersama mitra kerjanya di Bali.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate di Bali, Selasa (2/5), saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke Pulau Dewata tersebut. Fakta tersebut mengundang banyak investor datang ke Bali. Ditambah lagi sektor perbankan mampu mendorong kredit usaha rakyat (KUR) dengan baik. Tahun pertama Rp 1 triliun, tahun kedua Rp 2,9 triliun, dan pada 2016 mencapai Rp 3,5 triliun. Ini perkembangan yang sangat progresif.

"Di sisi lain ditandai juga dengan performing loan yang rendah di Bali. Ini berarti kerja sama dunia perbankan, industri, dan dunia usaha sudah berjalan dengan baik," kata politisi Nasdem tersebut. Sementara untuk menunjang pariwisata Bali, kini dibutuhkan infrastruktur perkotaan yang lebih bagus, termasuk mengatur calon underpass untuk mengatasi kemacetan. Semua ini untuk menciptakan iklim investasi di Bali semakin membaik.

Selain itu, Johnny menyoroti kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Karena pasar bank

ini sangat terbatas, perlu bekerja sama dengan bank-bank mainstream. BPR bisa bekerja sama dengan Bank Mandiri, BRI, BNI 46, dan BPD. "Asistensi SDM juga perlu dilakukan untuk menganalisis risiko. Satu hal yang perlu menjadi perhatian juga, walaupun KUR berkembang dengan baik, tapi keseimbangan antara yang dialokasikan ke sektor-sektor hulu dan sektor niaga tidakimbang," ucapnya.

Sektor niaga, sambung Johnny, masih terlalu besar, yaitu mencapai 60%. Sedangkan sektor hulu atau sektor yang terkait dengan nilai tambah, masih di 40%. Ini perlu mendapat perhatian bila pemerintah ingin mendorong percepatan akselerasi pertumbuhan ekonominya lebih bagus.

"Keseimbangan perlu dijaga. Sekali lagi secara umum di Bali ini, rasionya bagus, bahkan tingkat pengangguran dibawah 2% dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,6%. Tingkat kemiskinan di Bali hanya sekitar 4%, jauh dibandingkan nasional yang mencapai 10,6%," ungkap Johnny lebih lanjut. ■

## Setelah Dua Tahun Bayi Jangan Tinggal di Lapas

Anggota Komisi III DPR RI Rohani Vanath mengusulkan agar anak-anak bayi yang lahir di lapas termasuk lapas narkoba, setelah berusia dua tahun tidak lagi tinggal di lapas. Setelah usia dua tahun, anak bayi hendaknya bisa diasuh oleh keluarganya atau orang lain.

“ Saya prihatin, sekaligus kecewa dan menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai salah satu konsekuensi dari tanggung jawab, maka saya meminta kepala rutan harus dicopot. Tidak hanya itu, Kepala Kanwil hukum dan HAM setempat juga harus dievaluasi,” ujar Muslim kepada Parleментарia, Senin (7/5).

Meski demikian, lanjut Politisi dari Fraksi PAN, hal yang pertama harus dilakukan adalah tindakan antisipatif berupa Perlindungan terhadap warga. Karena menurut kabar tidak sedikit warga binaan yang kabur itu masuk dan menyandera warga sekitar. Itu tidak hanya menjadi tugas dari petugas Rutan, Kanwil Hukum dan HAM, melainkan juga menjadi tugas dari kepolisian untuk membawa kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut.

Terkait penyebab utama kaburnya lebih dari tiga ratus warga binaan tersebut, Muslim mengaku belum mendapat keterangan resmi dari pihak Kemenkumham. Namun ia tidak sependapat jika hal tersebut semata

(ran). Foto: Rizka/hr

“ Hal itu diutarakannya setelah meninjau Lapas Kelas II Mataram, Lombok, NTB, Selasa (2/5) lalu. Bersama Tim Kunker Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Desmond J. Mahesa, sejumlah anggota Dewan ini berkesempatan mengunjungi penghuni lapas.

Di teras ruangan tahanan itu, Tim Komisi III menyapa penghuni lapas dengan berbagai kasus. Sebagian besar para wanita itu terjerat kasus narkoba, namun ada juga yang terjerat kasus lain seperti pembunuhan, tipikor dan asusila.

Ada dua ibu muda yang menggendong bayi, yang satu baru berusia 7 bulan dan yang satunya baru lahir 3 hari. " Saya sebagai seorang ibu merasa tergugah, tersentuh melihat bayi hidup di dalam lapas. Memang kalau diasuh di luar, terpisah dari ibu kandungnya saya paham bagaimana perasaannya," tutur Rohani.

Namun lanjutnya, demi masa depan dan kesehatan si bayi, pihaknya menyarankan bisa diasuh di luar lapas setelah bayi berusia dua tahun. Bisa dibayangkan hidup bersama tahanan lain dalam suasana dan lingkungan tahanan,



Anggota Komisi III DPR RI, Rohani Vanath (tengah)

bicara dengan bahasa terekam memori si bayi. " Bayi itu ibarat kertas masih putih bersih tapi yang direkam kehidupan lingkungan gelap seperti itu," tekan dia.

Usulan itu, kata politisi PKB ini, semata-mata untuk masa depan si bayi. Jangan

sampai generasi yang melanjutkan sudah tercemar hal-hal negatif dalam masa pertumbuhannya. " Karena itu saya usul setelah usia dua tahun, bayi di lapas bisa dipisahkan dari orang tuanya dan diasuh oleh keluarganya," ujarnya lagi. ■

(mp), Foto:mastur/hr

## Legislator Sesalkan Kabar Masal Warga Binaan Rutan Sialang Bungkok

Anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub prihatin sekaligus menyesalkan terjadinya peristiwa kaburnya ratusan warga binaan dari Rumah Tahanan (rutan) Sialang Bungkok, Pekanbaru baru-baru ini.



Anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub

dikarenakan over capacity atau kelebihan kapasitas rutan. Pasalnya, hampir semua rutan dan lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Namun hingga kini tidak terjadi peristiwa sebagaimana yang terjadi di Rutan Sialang Bungkok, Pekanbaru.

"Saya tidak sependapat kalau dikatakan penyebab utama kaburnya warga binaan di Sialang Bungkok itu karena over capacity. Karena hampir semua Rutan dan Lapas di Indonesia kelebihan kapasitas, Aceh yang merupakan Dapil saya juga kelebihan kapasitas. Tapi sampai hari ini kondisinya aman-aman saja," jelasnya.

Lebih lanjut Politisi dari Dapil Aceh ini menduga peristiwa tersebut terjadi dikarenakan sikap dan pelayanan dari para petugas. Sikap kasar dan adanya tindakan diskriminatif terhadap warga binaan, hingga adanya "Permainan uang" oleh petugas rutan. Ia berharap Menkumham terus memberikan pelatihan, dan evaluasi secara periodik kepada para petugas lapas dan rutan. Hal itu semata agar kejadian serupa tidak terulang lagi di rutan ataupun di Lapas lainya. ■

(ayu), Foto: Ayu/hr



## Diapresiasi, Deklarasi Perang Narkoba oleh Polda Sumut

Komisi III DPR RI Deklarasi Perangi Narkoba di Markas Polda Sumatera Utara

Komisi III DPR RI mengapresiasi upaya Polda Sumatera Utara dalam pemberantasan Narkoba baik di lingkungan asrama Polda sendiri, maupun di seluruh wilayah hukum di Sumatera Utara. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Markas Polda Sumatera Utara, Rabu (3/5).

“ Kami bersyukur bisa menyaksikan langsung deklarasi bebas atau perang terhadap Narkoba yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, yang melibatkan 27 Polres dan 3 asrama yang ada di wilayah hukum Polda Sumut. Untuk itu kami mengapresiasi langkah tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan.

Dengan deklarasi tersebut, lanjut Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, paling tidak setengah dari permasalahan narkoba di Sumut ini terselesaikan. Artinya, tidak ada lagi kesempatan bagi oknum-oknum Polisi yang "bermain-main" dengan narkoba.

Sementara itu Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan bahwa deklarasi bebas narkoba di lingkungan asrama dan Polda Sumatera utara yang melibatkan seluruh polres di Sumut ini merupakan sebuah komitmen bersama dalam pemberantasan narkoba. Pihaknya meyakini akan memberikan sanksi tegas berupa

pemecatan dan keluar dari asrama kepada anggotanya jika terbukti menggunakan, atau mengedarkan narkoba.

"Kami membuat slogan "bersih-bersih ke dalam, hajar ke luar" untuk pemberantasan narkoba. Artinya untuk membersihkan narkoba di wilayah hukum Sumatera Utara ini diperlukan "sapu" yang bersih. Oleh karena itulah untuk dapat membebaskan Sumatera utara dari narkoba, diri sendiri (polisi-red) harus bersih terlebih dahulu. Barang siapa (polisi-red) yang mencoba-coba "bermain" dengan narkoba, maka kami berikan sanksi tegas, pemecatan dan keluar dari asrama," tegas Rycko.

Meski demikian Trimedya Panjaitan meyakini bahwa dalam beberapa bulan ke depan masih akan ada kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polda Sumatera Utara. Untuk itu ia berharap dapat menyaksikan secara langsung pemusnahan barang bukti narkoba. Karena dari sanalah akan terlihat

dan terukur kinerja dari polres-polres yang ada usai pendeklarasian "perang terhadap Narkoba" ini.

Lebih lanjut, Politisi asal Sumatera Utara ini berharap agar deklarasi dan komitmen perang terhadap narkoba yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara ini dapat diikuti oleh seluruh Polda, bahkan TNI (tentara nasional Indonesia). Dengan demikian, secara tegas menjadi sebuah "warning atau peringatan" bagi seluruh anggota Polisi dan TNI di seluruh wilayah Indonesia.

Pada kesempatan itu Trimedya juga didampingi anggota Komisi III lainnya seperti Junimart Girsang, Muslim Ayub, Nasir Djamil, Hasrul Azwar Harahap, Syaiful Bahri Ruray, Masinton Pasaribu, Muhammad Syafe'i, Abdul Wahab Dhalimunte, Marsiaman Saragih, dan Tifatul Sembiring. Tidak hanya itu, Gubernur Sumatera Utara, T Erry Nuradi dan Kepala BNNP (badan narkotika nasional Provinsi) Sumut, Brigjen Pol Andi Loedianto juga ikut menghadiri deklarasi tersebut. ■

(evu)/fotoayuhtr.



# Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cukupi Alat Pertanian di Purbalingga

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah agar mencukupi alat mesin pertanian (Alsintan) dan pembangunan jaringan irigasi Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga. Ini penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

**H**al tersebut disampaikan menanggapi keluhan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meminta tambahan bantuan Alsintan dan pembangunan jaringan irigasi Bendung Slinga. Selain itu, Pemkab juga mengusulkan agar beras sejahtera untuk masyarakat miskin diganti dengan jenis beras premium.

Politisi Partai Demokrat ini juga mendesak Bulog agar mendistribusikan beras berkualitas baik untuk masyarakat. Dia amat menyayangkan kondisi saat ini, masyarakat masih mendapat beras jelek

dan berbau apek. Untuk itu, Bulog harus bersedia mengganti dengan beras berkualitas baik. "Beras Rasta yang kualitasnya kurang baik harus segera diganti dengan beras Rasta yang baik," imbaunya, singkat di Purbalingga, Rabu (3/5).

Sementara itu, Bupati Purbalingga Tasdi mengungkapkan, sektor pertanian di kabupatennya terkendala minimnya sarana dan prasarana pertanian. "Permasalahan sektor pertanian yang masih kami hadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pertanian khususnya alat mesin pertanian dan jaringan irigasi dari Bendung Slinga

yang belum terwujud. Oleh karenanya, kami memohon kepada Komisi IV DPR RI untuk membantu mengatasi persoalan tersebut," kata Tasdi.

Lebih lanjut Tasdi mengatakan, kondisi Alsintan yang ada saat ini, traktor roda dua dari kebutuhan 1.400 buah sudah tersedia 1.024 atau kurang 376 buah. Pompa air tersedia 527 buah (kurang 313 buah). Corn sheller tersedia 59 (kurang 341 buah). Selain itu, power thresher tersedia 957 (kurang 443 buah) dan transplanter tersedia 21 buah (kurang 399 buah). ■

(andri), Foto:andri/hr



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah agar mencukupi alat mesin pertanian (Alsintan)

## Banyak Sarpras Pendidikan Tanah Air Tidak Layak

Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI telah selesai, dan telah menyerahkan rekomendasinya kepada pemerintah. Rekomendasi juga disusun dari hasil pengamatan dan peninjauan kondisi di lapangan. Bahkan dari setiap kunjungan kerja yang dilakukan Komisi X DPR RI telah membuktikan bahwa banyak sarpras pendidikan yang tidak layak.

**D**emikian diungkapkan anggota Komisi X Mujib Rohmat di sela-sela kunjungan kerja Komisi X ke Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, baru-baru ini. Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih (F-PKS) itu, tim kunker mengunjungi sejumlah sekolah, diantaranya SDN 39 Sungai Kakap, SMPN 1 Sungai Kakap, dan SMP Tunas Bangsa.

"Dari hasil Panja Sarpras, ini membuktikan bahwa kesimpulan kita terkait sarpras menjadi semakin tepat. Terbukti bahwa masih banyak sarpras pendidikan yang tidak layak dan tidak patut, serta tidak mendapatkan perhatian. Ternyata ada yang rusaknya parah atau sedang, rusak ringan juga banyak," jelas Mujib.

Menurutnya, dengan kondisi sarpras sekolah yang tidak layak itu, dikhawatirkan mengancam keselamatan murid. Seperti atap jebol yang hampir roboh. Tentunya ini juga membuat murid tidak nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Khusus hasil peninjauan di Kubu Raya ini, dirinya menemukan sekolah yang atapnya jebol.

"Kita lihat di SDN 39 Sungai Kakap, ada yang sudah tidak layak sama sekali, atapnya jebol, kalau hujan pasti anak-anak kehujanan. Karena itu saya kira ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah dan pusat. Kita menyarankan supaya pemerintah memberikan satu kebijakan yang bersifat



Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat berfoto bersama dengan murid sekolah dasar saat kunker ke Kalimantan Barat

afirmatif, misalnya apakah nanti dalam bentuk Inpres untuk sarpras," papar Mujib.

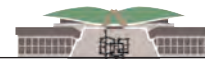
"Kita rumuskan, kalau menggunakan INPRES itu dibutuhkan 4-5 tahun. Kalau menggunakan pendekatan biasa, seperti melalui DAK misalnya, ini akan bisa sampai 20-25 tahun. Semoga atas dasar rekomendasi dari Panja Sarpras Komisi X, pemerintah bisa mengakomodasi," harap Mujib.

Di sisi lain, politisi F-PG itu juga menemukan adanya fenomena yang berbeda dibanding kondisi sarpras pendidikan dengan daerah lain. Terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kebanyakan dilaksanakan oleh sekolah negeri, baru kemudian sekolah swasta. Namun di

Kubu Raya, UNBK tingkat SMP malah dilaksanakan oleh swasta. Tak ada satupun SMP Negeri yang menggunakan UNBK.

"Biasanya terjadi kesenjangan, sekolah negeri itu yang lebih mapan, dan lebih baik daripada yang swasta. Ini yang terjadi adalah kebalikannya. Dari 220 SMP di Kubu Raya, hanya 2 yang UNBK, itu pun diselenggarakan oleh swasta. Berarti negerinya belum ada satupun yang menyelenggarakan UNBK. Saya kira ini menjadi catatan penting untuk pemerintah," jelas Mujib.

Terkait jumlah guru yang masih belum mencukupi di Kubu Raya, ini juga menjadi catatan pentingnya. Pihaknya juga sudah meminta kepada kementerian terkait untuk mencabut moratorium guru PNS.



Menurutnya, jika moratorium guru keahlian disamakan dengan PNS administrasi, tentu ini sangat mengkhawatirkan.

"Jika guru PNS itu banyak yang pensiun, lalu bagaimana. Kita minta kepada pemerintah, terutama di bidang pendidikan, guru itu seharusnya dibuka untuk rekrutmen PNS-nya. Moratorium itu bisa untuk PNS administrasi, tapi kalau guru PNS harus dicek kembali," dorong politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Hermanus menjelaskan, dari 220 SMP yang melaksanakan UN di daerahnya, hanya dua sekolah yang melaksanakan UNBK. Sisanya masih menerapkan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP). Dua sekolah itu pun swasta, yakni SMP Tunas Bangsa dan SMP Taruna.

"Permasalahannya masih lambatya Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional, dan termasuk masih minimnya siswa yang mampu mengoperasikan komputer. Ini kendala kita ketika akan melaksanakan UNBK," jelas Hermanus.

Kepala Sekolah SDN 39 Sungai Kakap Siti Muhadiati mengatakan, untuk sarpras, khususnya ruang kelas, Siti memaparkan bawa saat ini ada tujuh ruang belajar yang dibangun pada tahun 1987, dan belum direnovasi.

"Sehingga ruang tersebut kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar. Kami merasa kurang aman ketika belajar berlangsung, karena dek plafon hampir jebol, dan atapnya sudah bocor. Kemudian halaman sekolah selalu banjir karena daerah kami di sekitar sungai yang pasang surut," jelas Siti.

Sementara terkait kekurangan guru, pihaknya merekrut tenaga pengajar honorer, dan menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar tenaga honorer.

"Kami berharap dengan hadirnya Komisi X DPR RI ke Kubu Raya, kekurangan yang kami alami, dapat segera diajukan untuk dipenuhi, sehingga KBM dan untuk menyongsong sekolah sehari penuh atau *full day school* itu bisa benar-benar dilaksanakan. Karena saat ini tidak memungkinkan," papar Siti. ■

(sf/so). Foto: Sofyan/hr

## Banyak Sarpras Sekolah di Palembang Rusak

Banyak sarana dan prasarana sekolah di Kota Palembang, Sumatera Selatan (sumsel) yang rusak dan butuh perhatian pemerintah. Dari gedung SD, SMP, dan SMA selalu banyak ditemukan kerusakan. Ini akan merusak konsentrasi para siswa.

Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati mendesak agar segera ada perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana sekolah di Palembang. Hal tersebut diungkapkannya saat kunjungan kerja komisi X ke Palembang, Sumsel, Selasa (2/5). "Kita melihat sekolah yang kita kunjungi ini memerlukan perhatian dan percepatan perbaikan," ujarnya.

Komisi X, lanjut Esti, menemukan sebuah SD yang berdiri di atas rawa dengan fasilitas yang sangat minim. Bahkan, penyangga bangunan sekolah sudah rapuh. Ini membahayakan bagi para siswa dan guru. "Menurut kita itu tidak layak digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Kita ingin percepatan perbaikan, kalau bisa dipindahkan ke tempat yang tidak jauh dari tempat yang sekarang ada," katanya.

Anggota F-PDI Perjuangan ini sempat meninjau sekolah lain dengan kondisi yang memprihatinkan, seperti atap jebol dan tembok retak. Maka dari itu, Komisi X meminta laporan dari Dinas Pendidikan setempat, seberapa banyak dan seberapa parah kerusakan sekolah di Sumsel.

"Prioritas utama adalah perbaikan infrastruktur dan juga ruang-ruang kelas yang tidak memenuhi syarat, termasuk pengadaan

alat-alat laboratorium yang dibutuhkan sekolah-sekolah tersebut," tutur Esti.

Di sisi lain, dia menyorot pula minimnya jumlah mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Mayoritas calon mahasiswa tersedot ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurutnya, ini mengancam keberadaan PTS di Sumsel.

"Perguruan tinggi swasta ini banyak yang hampir tutup, karena mahasiswanya tersedot ke negeri. Sementara dilaporkan, hanya 18% dari jumlah pendaftar yang masuk PTN," ungkap Esti.

Angka partisipasi siswa masuk perguruan tinggi, sambung Esti, masih dibawah 30% secara nasional. Padahal angka partisipasi minimal mestinya 31%. Di Palembang, masih sekitar 29%. "Tentu ini masih sangat rendah. Ketika kita bicara di 2019, harus 36% angka partisipasi masuk perguruan tinggi. Ini jadi PR besar bagi kita."

Ditambahkan Esti, PTS juga tidak boleh dilupakan. Selama ini, anggaran memang hanya diberikan kepada PTN. PTS harus bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk membantu mencari sumber pendanaannya. "Ini komitmen kita bersama, bagaimana meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dan memfasilitasi sekolah-sekolah swasta agar berkualitas," tutupnya. ■

(rief). Foto:arif/hr



Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati meninjau sekolah saat kunker ke Palembang



Studi Lapangan PKAKN Badan Keahlian DPR RI di Kota Bandung

## Penerapan SAP Berdampak Positif

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual menuntut komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerahnya,

Banyak dampak positif yang dirasakan oleh Pemerintah kota Bandung terkait penerapan SAP sebagaimana disampaikan Koswara, Inspektur Pemkot Bandung, dihadapan Tim PKAKN (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara) Badan Keahlian DPR RI, Bandung (9/5).



pencapaian tujuan, papar Koswara.

Bandung sebagai kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat telah meraih berbagai penghargaan yaitu sebanyak 74 penghargaan di tingkat provinsi, 146 di tingkat nasional, dan 11 di tingkat internasional. Hal ini mencerminkan hasil reformasi birokrasi yang membawa dampak positif yang signifikan bagi Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan IHPS 1 Tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung memperoleh opini atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal yang menarik adalah capaian tersebut tidak mendapatkan peningkatan yang paralel dengan penghargaan di bidang-bidang lainnya. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut Kota Bandung hanya memperoleh opini WDP terkait penerapan SAP berbasis akrual.

Hal inilah yang menarik bagi PKAKN, "kami berkunjung dan melaksanakan kegiatan studi lapangan ke BPK Perwakilan Jawa Barat, BPKP dan Pemkot Bandung untuk memperoleh informasi mendalam tentang hal tersebut. Kami juga ingin mengetahui akar permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penerapan SAP berbasis akrual," ujar Helmizar selaku ketua Tim PKAKN.

Ditempat yang berbeda, Deni Suardini selaku Kepala BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat, mengatakan, "Permasalahan utama yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual di Jawa Barat termasuk Kota Bandung



Kepala BK DPR RI menyerahkan cendera mata kepada Kepala Perwakilan BPKP

adalah tidak efektifnya penerapan aplikasi SIMDA dan hambatan dalam penghitungan aset wilayah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangannya, Pemerintah Kota Bandung menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Akan tetapi dalam penatausahaan asetnya, mereka memilih untuk menggunakan aplikasi lain yang lebih mutakhir yang dikembangkan oleh konsultan. Permasalahan yang dominan adalah kesulitan dalam pencatatan aset peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda yang menyebabkan sulitnya perhitungan dan penelusuran nilai total aset. Demikian papar Deni di hadapan K Johnson Rajagukguk, SH.,MH Kepala Badan Keahlian Dewan, yang turut hadir bersama TIM PKAKN.

Penyebab BPK memberikan WDP lima tahun berturut-turut kepada Pemerintah Kota Bandung berakar dari neraca awal tahun 2005 dimana terdapat aset yang tidak diketahui nilai ataupun lokasinya secara jelas. Hal ini kemudian menyebabkan kerancuan dalam penentuan saldo awal untuk neraca tahun berikutnya dan kualitas penyusunan LKPD.

Efek domino tersebut kemudian menjadi kendala bagi Kota Bandung untuk mendapatkan opini WTP. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan solusi namun sampai saat ini belum ada yang memuaskan BPK sebagaimana diutarakan oleh Koeswara selaku Kepala Inspektorat Kota Bandung. Akan tetapi, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat percaya bahwa Walikota Bandung memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya perbaikan kualitas laporan keuangan daerahnya sehingga diharapkan penyelesaian permasalahan aset yang berlarut ini dapat segera ditemukan solusi perbaikannya. ■



Kapus PKAKN menyerahkan cendera mata kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat

**P**enerapan SAP sangat berdampak positif karena hal tersebut dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, ujar Koswara. Lebih lanjut dikemukakan, "masyarakat dapat mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah, sedangkan bagi pemerintah kota, SAP menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah terkait jasa layanan, efisiensi dan

# Reforma Agraria Bersinergis dengan Program Cetak Sawah

Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah sangat bersinergis dengan program cetak sawah yang sudah bergulir. Tanah objek reforma agraria (TORA) akan didistribusikan sebagian untuk sektor pertanian.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengemukakan, program TORA dan cetak sawah bisa saling mendukung. Komisi IV sendiri sudah mencanangkan pengadaan lahan pertanian kepada Menteri Pertanian yang salah satunya adalah untuk cetak sawah baru. Tahun lalu sudah 130 ribu hektare lahan diadakan. Tahun ini akan diadakan lagi 80 ribu hektare lahan baru untuk pertanian.

"Kalau disinergiskan dua program ini, bisa saling mendukung mengatasi keterbatasan lahan dan dana yang dihadapi para petani. Pemerintah bisa membuka lahan bagi rakyat. Program TORA pada prinsipnya sama dengan program pemerintahan sebelumnya, yaitu pengalihan tanah negara bebas untuk masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana secara teknis administratif bisa didistribusikan kepada masyarakat," ungkap Herman di ruang kerjanya Rabu (10/5).

Tanah negara bebas, sambung Anggota F-PD ini, adalah tanah yang *free, clear, and clean*. Tanah ini sudah dinyatakan bebas dari konflik. Dulu di era ORBA, ada program transmigrasi yang memberikan efek luar biasa terhadap ketersediaan pangan, karena memang didistribusi khusus bagi para transmigran yang basisnya meningkatkan produksi pangan. "Program itu terus berlanjut hingga era Pak SBY dan Jokowi. Program ini sangat realistis," tutur Herman.

Saat ini, kata politisi dari dapil Jabar VIII itu, ada TORA seluas 4,9 juta hektare yang bisa diberikan kepada masyarakat. Selain itu, masih ada 124 juta hektare lahan kehutanan milik negara. Lahan ini juga *free, clear, and clean* adalah hutan negara. Program ini, sekali lagi, didasarkan pada UU Pokok Agraria tahun 1960 yang memberi dasar terhadap reforma agraria. Setiap pemerintahan selalu melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat.

"Dari sisi ketersediaan tanah maupun regulasi sudah memadai untuk melakukan program ini. Pada zaman Pak SBY dicanangkan 1 juta hektare. Zaman Pak Jokowi dicanangkan redistribusi tanah sebesar 9 juta hektare. Nah, apakah 9 juta ini bisa tercapai, tentu bergantung pada situasi terkini, bagaimana pengalihan tanah negara bebas ini disertifikasi kemudian menjadi tanah rakyat. Memang tidak mudah dan tidak sederhana pengalihannya. Lahan-lahan tersebut ditujukan untuk memudahkan usaha rakyat," papar Herman.

Ditambahkannya, pada tahun 2045 dengan asumsi penduduk Indonesia mencapai 300 juta, tentu butuh tambahan lahan baku pertanian sekitar 15 juta hektare. Bila kini sudah ada 7,5 juta hektare, maka butuh 7,5 juta hektare lagi. Tinggal sekarang seberapa kuat negara dalam reforma agraria ini, mampu menyediakan tambahan lahan pertanian untuk swasembada dan mewujudkan kedaulatan pangan.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron

"Tantangan ke depan semakin besar. Jumlah air semakin sulit, perubahan iklim semakin ekstrim, dan hama pengganggu tanaman bermunculan. Banyak sekali persoalan sektor pertanian ke depan, selain masalah lahan," ungkap Herman. ■

(mth), Foto:Kresno/hr

## DPR RI Dorong Penambahan Anggaran Panti Sosial di Banjarbaru

Komisi VIII DPR RI mendorong tambahan alokasi anggaran Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Panti asuhan ini merehabilitasi penyandang cacat mental eks psikotik.

Dalam lawatannya ke panti itu, rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII yang dipimpin Noor Achmad melihat dari dekat kondisi panti dan para penghuninya. Panti yang berdiri di atas lahan 3,5 hektar ini, dihuni oleh 70 pasien. "Harusnya dengan panti seluas ini mampu menampung lebih dari 100 pasien. Ini hanya dihuni oleh 70 pasien, karena kekurangan dana," tutur Noor, Selasa (3/5).

Ketua panti tersebut menuturkan, lemahnya pengawasan terhadap pasien yang sudah

# BLK Palangkaraya Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Syamsul Bachri (F-PG) meninjau Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Tenaga Kerja Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa, (2/5). Setiba di BLK, Tim Kunker Komisi IX DPR RI langsung meninjau beberapa ruang latihan yakni, ruang listrik, ruang otomotif, dan ruang meubel.

“Hari ini kita meninjau BLK Palangkaraya untuk melihat sejauh mana perkembangan BLK ini. Di ruang bengkel atau ruang otomotif kita temukan alat-alat praktik yang sudah jadul dan berdebu. Ini tidak pas dengan daya serap industri sekarang,” kata Syamsul.

Pasalnya, BLK yang luasnya 2 hektar itu menjadi tidak produktif, karena satu angkatan hanya menghasilkan 12 orang, “Kami memang kurang puas dengan kinerja BLK yang ada di sini, terkait peralatan yang tidak memadai dan ketinggalan zaman, serta optimalisasi pemanfaatan yang sangat rendah di tanah yang seluas ini,” katanya.

Menurutnya, instruktur pengajar juga sangat minim, itu terjadi karena fasilitas dari pemerintah sedikit dan biaya BLK sangat rendah sehingga optimalisasi menjadi berkurang.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri meninjau Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Tenaga Kerja Palangkaraya, Kalimantan Tengah

“Mereka belum tahu dengan adanya slogan program dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), yaitu reorientasi dan rebranding ini, karena kurang adanya

sosialisasi. BLK di sini seperti di daerah lain yang bernasib sama dengan BLK yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah. BLK sampai saat ini tidak difungsikan dengan baik untuk peningkatan kualitas SDM. Apabila ini dilakukan berkelanjutan, maka akan mubazir,” ujarnya.

“Harusnya BLK dapat memberi pelatihan yang optimal, sertifikasi, dan penempatan yang tepat guna menghadapi pasar dagang zaman ini, sehingga produktivitasnya benar-benar bisa diandalkan,” tambahnya.

Lebih lanjut Politisi asal F-PG ini, mengatakan bahwa pemerintah daerah setempat membiayai BLK sangat rendah.

Bantuan dari pemerintah pusat juga tidak menggembirakan. “Frekuensi BLK minim, karena tidak didukung dengan biaya yang cukup,” tutupnya. ■

(chaes), Foto: chasbi/hr

sembuh. Mereka yang dinyatakan sembuh, kerap kambuh lagi, karena salah memberi obat saat berada di lingkungan tempat tinggalnya. Ini jadi perhatian serius Komisi VIII.

Di sisi lain, Komisi VIII juga mengapresiasi para pengurus panti tersebut yang mampu memberdayakan para pasien untuk hidup mandiri. Mereka diajarkan membuat kerajinan berupa tasbih dan gelang. Sebagian diajarkan pula membuat batako, membudidayakan lele, mengolah makanan ringan, dan keterampilan memotong rambut.

“Kita harapkan para pasien setelah



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad melihat dari dekat kondisi panti dan para penghuninya saat kunker ke Kalimantan Selatan

sembuh dan kembali ke masyarakat mampu bekerja dan bermanfaat di masyarakat

dengan apa yang sudah didapatkan di panti,” tutur Anggota Komisi VIII dari PKB Bisri Romli. Ia berharap kepada pengurus panti agar terus memberdayakan para pasiennya dengan ilmu keterampilan. Hasil karya para pasien juga harus dibantu dipasarkan ke publik, sehingga ada keuntungan yang diraih.

Turut serta dalam kunjungan kerja ke Kalsel ini John Kenedy Aziz, Endang Maria Astuti, Bisri Romli, Surahman Hidayat, Achmad Fauzan, Alfia Reziani, Anda, dan Dwi Astuti A. ■

(rep), Foto:hr/hr

# Saluran Irigasi di Kabupaten Humbang Hasudutan Perlu Diperbaiki

Saluran irigasi di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Banyak infrastruktur irigasi tak terawat, sehingga mengganggu produktivitas pertanian setempat.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin kunjungan kerja ke Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, Selasa (2/5). "Salah satu kendala di Kabupaten Humbang Hasudutan ada pada sistem irigasi yang tidak terawat. Kami berharap, pemerintah daerah setempat segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memperbaiki sistem irigasi ini," kata Edhy usai meninjau irigasi.

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu, mengatakan, karena kendala saluran irigasi yang tidak terawat tersebut, maka ada sekitar 5000 hektar lahan pertanian belum bisa digarap oleh masyarakat. Padahal, sektor pertanian di sini sangat potensial. "Pertanian di Humbang Hasudutan berpotensi untuk dikembangkan, seperti kopi, tanaman pangan, termasuk tanaman perkebunan dan tanaman holtikultura. Namun, selama ini terkendala pada sistem irigasi," jelasnya.

Edhy mendesak Bupati Kabupaten Humbang Hasudutan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merehabilitasi akses irigasi tersebut. Pemda juga diharapkan bisa membantu memberikan sarana prasarana untuk mengembangkan lahan tidur. Dengan begitu, perekonomian masyarakat juga meningkat. ■

(rmm), Fotocria/hr



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo memimpin Kunjungan ke Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumut





## Normalisasi Sungai Karama di Mamuju Tengah Butuh 70 Miliar

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain melakukan peninjauan lapangan objek Badan Penanggulangan Bencana

Kebutuhan anggaran sekitar 70 miliar untuk normalisasi sungai Karama di Mamuju Tengah (Mateng) terungkap saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain melakukan peninjauan lapangan objek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat ke Desa tangguh Bencana Desa Pangale Kecamatan Pangale Kabupaten Mateng, Selasa (2/5).

**M**enanggapi usulan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain akan meneruskan hal tersebut kepada Komisi terkait yang lebih kompeten dalam hal pembangunan infrastruktur sungai.

"Masalah anggaran normalisasi sungai sebenarnya menjadi wilayah kerja (domain) Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, kami dari Komisi VIII DPR RI bermitra dengan BNPB fokus pada anggaran penanggulangan bencana," jelas politisi muda PKB ini.

Oleh karenanya Malik justru menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi dampak bencana alam. Apalagi jika bencana tersebut sifatnya siklus tahunan seperti banjir akibat luapan air sungai,

sehingga kesiap-siagaan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Malik Haramain juga memompa semangat masyarakat Desa Pangale dan para relawan Desa Tangguh Bencana agar tidak berputus asa dalam menghadapi bencana alam yang terjadi hampir setiap tahun.

"Bencana alam itu datangnya dari Allah kita tidak bisa menolak, namun sebagai manusia kita diberi akal pikiran untuk digunakan mengantisipasi dan mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam," pesan Malik.

Senator asal Dapil Jatim II ini juga meyakinkan masyarakat bahwa pihaknya melalui Komisi VIII DPR RI akan menyerap aspirasi masyarakat terkait langkah-langkah penanggulangan bencana di wilayah Pangale dan sekitarnya.

Kepala BPBD Kabupaten Mateng Rahmat Syam mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang beresiko bencana. Luasnya mencapai 30 hektar area persawahan dan kebun sawit yang setahun sekali tersapu banjir.

"Kabupaten Mateng baru berusia 4 tahun sehingga butuh perhatian dari bapak-ibu anggota DPR RI untuk mendapatkan anggaran yang memadai. Kami pun baru memiliki Bupati," ungkap Rahmat Syam.

BPBD Kabupaten Mateng salah satu programnya mendidik masyarakat agar siap dalam menghadapi bencana. Adanya sungai Karama yang sering meluap jika hujan deras perlu segera dinormalisasi sebagai salah satu solusi jangka panjang, pungkas Syam. ■

(ojl/imp), Foto: Naefuroji/hr

## Pengembangan Pariwisata Harus Perhatikan Aspek Pendidikan

Potensi pariwisata di Indonesia cukup besar, sehingga beberapa daerah mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan daerah tersebut, fokus pada dua sektor, yaitu pariwisata dan pertanian. NTB yang merupakan daerah gugusan pulau-pulau tentu memiliki daya tarik tersendiri terutama potensi pariwisatanya.

Pengembangan pariwisata tersebut tentu harus memperhatikan aspek-aspek sosial maupun pendidikan bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI ke Pulau Gili Trawangan Lombok mengatakan bahwa Pulau Gili Trawangan salah satu prioritas dari destinasi pariwisata yang diterapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Riefky menyampaikan bahwa prioritas destinasi pariwisata seperti Gili Trawangan jangan sampai melupakan aspek pendidikan bagi masyarakat sekitarnya. Pendidikan bagi masyarakat tersebut tentu sangat penting dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah tersebut.

"Pendidikan bagi masyarakat di daerah prioritas destinasi pariwisata sangat penting. Jangan sampai masyarakat lokal hanya sebagai penonton dan justru dari luar daerah tersebut yang mengembangkan pariwisata," ungkap Riefky.

Ke depan, Kemendikbud dan Kemenpar perlu bersinergi, terutama di daerah yang menjadi prioritas destinasi pariwisata. Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, namun perlu dibangun pula SDM masyarakat sekitar, agar kesejahteraan dan roda perekonomian terus berkembang.

Politisi Partai Demokrat ini juga berharap, perhatian terhadap sekolah kejuruan khususnya yang berkaitan dengan pariwisata bisa lebih diperhatikan, karena masih ditemukan sekolah kejuruan yang memiliki kekurangan sarana dan prasarana untuk praktik. Disisi lain, daerah tersebut merupakan daerah prioritas pariwisata. ■

(skr), Foto: singih/r/r



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR ke Pulau Gili Trawangan Lombok

## Dewan Dukung Bidan PTT Diatas 35 Tahun Jadi PPPK

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mendukung penuh program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, program ini merupakan solusi bagi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak bisa diangkat menjadi ASN karena terkendala usia.

Demikian diungkapkannya saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Kunjungan Kerja Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, baru-baru ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pengangkatan bidan PTT sudah mencapai 35.000 orang di seluruh Indonesia. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, 800 diantaranya sudah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan masih menyisakan sejumlah tenaga bidan



# Soepriyatno Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan di NTB

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengapresiasi turunnya angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penduduk miskin di NTB pada September mencapai 786.580 jiwa dari sebelumnya pada Maret 2016 sebanyak 804.450 jiwa. Berarti ada penurunan sebesar 0,46 persen.

terbanyak terjadi di pedesaan, yakni dari 419.230 jiwa pada Maret dan berkurang menjadi 407.750 jiwa pada September 2016. Sementara penduduk miskin di perkotaan berkurang dari 385.220 jiwa, turun menjadi 378.830 jiwa.

Soepriyatno menilai bahwa jika dilihat pertumbuhan secara keseluruhan, NTB masih kurang bagus, karena hanya mengandalkan ekspor pertambangan. "Padahal, kalau kita lihat di tahun 2014-2016, pertumbuhan mengalami situasi



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno saat kunker ke NTB

**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Menurut Periode Waktu, 2012 - 2016

Wilayah Provinsi	2012		2013		2014		2015		2016	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Provinsi Nusa Tenggara Barat	18,65	18,02	17,87	17,22	17,24	17,05	17,19	16,24	16,48	16,02

<http://ntb.bps.go.id>

“ Pengurangan angka kemiskinan di NTB tahun 2016 sudah bagus walaupun dalam tahun tersebut situasi agak sulit, karena banyaknya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Namun, pertumbuhan ekonomi di NTB di atas rata-rata nasional,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, angka kemiskinan yang

yang sulit, sehingga penerimaan dari APBD menjadi berkurang,” ungkapnya.

Ketua tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ini, mengatakan bahwa tujuan kunjungan kali ini ke NTB, untuk melihat dari dekat permasalahan pengelolaan APBD dan laporan keuangan di NTB. ■ (faz) foto: azka/hr



Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati saat kunker ke Provinsi Bengkulu

yang diatas usia 35 tahun.

"Komisi IX sudah m e m i n t a K e m e n t e r i a n Kesehatan dan Men-PAN RB agar mereka yang berusia 35 tahun ini juga diakomodir, yaitu melalui PPPK. Mudah-mudahan ini segera terealisasi," harap politisi dari dapil Bengkulu ini.

D e n g a n pengangkatan ini, Elva berharap

mengingatkan pihak dinas kesehatan serta kepala puskesmas setempat agar mengatur jadwal piket tenaga bidan dengan baik, jangan sampai terjadi kekosongan.

"Memang beberapa waktu lalu ada isu bidan tidak berada di tempat, saat pasien dalam kondisi mau melahirkan. Saya harap ke depan ini tidak terjadi lagi," tegas Elva.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kurangnya tenaga spesialis di Provinsi Bengkulu, ia mengimbau agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga medis, sehingga mereka pun merasa nyaman jika ditempatkan Provinsi Bengkulu.

"Kesejahteraan, fasilitas mereka dipenuhi sehingga para tenaga medis mau diajak untuk bekerja di Bengkulu ini," tandas politisi PDI-Perjuangan ini. ■ (chas,mp), Foto:chasbi/hr

yang belum terangkat, karena terbentur aturan ASN. Sisi lain, mereka mempertanyakan status bagi bidan PTT

nantinya tenaga bidan PTT semakin semangat dalam menjalankan tugas di tempatnya masing-masing. Ia juga

# Sekjen DPR RI Berikan Pandangan Atas LKPJ Bupati Banyumas

Setelah dua kali berturut-turut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyumas gagal, lantaran tidak kuorum, DPRD pun meminta pandangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI menyangkut hal ini. Sekjen DPR RI Achmad Djuned menyarankan agar DPRD Banyumas menyusun kembali agenda rapat paripurna.

**D**emikian terungkap dalam pertemuan delegasi DPRD Kabupaten Banyumas dengan Sekjen DPR RI di Gedung Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/05). Mengawali pertemuan, DPRD Banyumas menyampaikan kronologi agenda LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016 yang gagal dua kali berturut-turut. Karena minim kehadiran para anggotanya, sehingga tidak mencapai kuorum.

Djuned mengatakan, LKPJ merupakan bentuk gambaran atau laporan kinerja pemerintah daerah setempat yang harus mendapat perhatian DPRD. Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat mestinya bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk

menilai kinerja kepala daerahnya saat rapat paripurna. "Ini saya kira tidak menguntungkan bagi rakyat. Padahal, yang kita harapkan, melalui LKPJ masyarakat bisa mengetahui program apa saja yang telah dilaksanakan

Banyumas Sardi Susanto mengatakan, pihaknya akan melaporkan rekomendasi yang didapatkan ini kepada pimpinan DPRD untuk segera dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banyumas. ■



Sekjen DPR RI Achmad Djuned melakukan pertemuan dengan delegasi DPRD Kabupaten Banyumas

oleh kepala daerah," ungkap Djuned.

Ia menyarankan kepada para wakil rakyat di DPRD Banyumas untuk kembali hadir dan mengagendakan rapat paripurna walaupun sudah melewati batas akhir penyampaian. "Secara politis masyarakat bisa mengetahui seperti apa program telah dijalankan oleh kepala daerah Banyumas," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD



Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwati Hatta berbicara dengan salah satu pasien di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek

## RSUD Abdul Moeloek Lampung Diminta Tingkatkan Kapasitas Pelayanan

Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek, di Provinsi Lampung, mulai dari kondisi gedung, fasilitas alat kesehatan, pelayanan BPJS, serta berdialog dengan seluruh jajaran rumah sakit.

(ann), Fotojaka/hr

# Komisi XI DPR RI Saksikan Pemusnahan Barang Sitaan di Teluk Bayur

Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dipimpin Marwan Cik Hasan menyaksikan langsung pemusnahan barang sitaan Bea dan Cukai di Teluk Bayur, Sumatera Barat. Barang kena cukai rokok dan barang hasil penindakan atas pelanggaran tindak pidana cukai dimusnahkan secara bersamaan.

“ Kami Komisi XI DPR RI puas dengan hasil yang dicapai jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe madya, atas hasil seluruh sitaan yang merugikan negara Rp 1,5 miliar. Sementara nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 2,5 miliar,” kata Marwan sesuai pertemuannya dengan jajaran Kementerian Keuangan Sumatera Barat.

Andhi Pramono Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Bayur mengungkapkan, barang sitaan yang dimusnahkan dengan dibakar ini, merupakan hasil pengamanan sepanjang Januari sampai April 2017. “Seluruh barang sitaan ini terdiri dari 4.137.480 rokok, 89 unit kosmetik, 19 jenis obat-obatan, 36 unit sex toys, dan 90 produk lainnya. Umumnya barang yang disita tidak mengantongi izin produksi ataupun legalitas,” kata Andhi.

Sementara itu, politisi PKS Refrizal mengatakan bahwa masuknya barang ilegal yang berasal dari luar negeri berasal dari kargo maupun barang bawaan penumpang di



Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dipimpin Marwan Cik Hasan menyaksikan langsung pemusnahan barang sitaan Bea dan Cukai di Teluk Bayur

Bandara Internasional Minangkabau.

“Seluruh barang yang disita, karena adanya peraturan larangan yang mengakibatkan barang-barang tidak

dipebolehkan masuk ke dalam negeri. Jadi, untuk rokok ditemukan pelanggaran, karena tidak memakai pita cukai dan pemalsuan produk rokok,” jelas Refrizal. ■

(hr). Foto: Eka/hr

**K**omisi yang membidangi kesehatan ini mendorong RSUD yang berencana akan mengembangkan menjadi rumah sakit kelas A pada tahun 2019. Untuk itu, diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas pelayanan dan infrastruktur sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.

Anggota Komisi IX Andi Fauziah Pujiwati Hatta menilai kesan pertama yang dilihat yaitu gedungnya yang masih kurang layak untuk sebuah rumah sakit dengan usia yang sudah lama, dan dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Persoalan yang utama adalah Lampung tidak jauh dari Pulau Jawa, seharusnya kesenjangan tidak begitu besar dibandingkan dengan Jawa. Tetapi setelah berkeliling ada bangunan-bangunan baru

dengan peralatan kesehatan yang sudah memenuhi standar.

Menurut Politisi Partai Golkar ini, banyak yang harus dilakukan oleh rumah sakit ini ke depan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan juga sarana dan prasarannya. Yang kedua adalah pelayanan terhadap pasien harus ditingkatkan.

“Mungkin dirasakan oleh pasien dan masyarakat sudah cukup baik tetapi tidak boleh berhenti disitu. Tetap harus meningkatkan kapasitas pelayanan, SDM, dan fasilitas alat kesehatan dengan mengikuti perkembangan zaman,” kata Andi Fauziah di sela peninjauan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (2/5).

Menurutnya, kesehatan adalah hak dan investasi, tetapi di dalam pelaksanaannya

karena kesehatan itu sesuatu yang sangat penting dan melekat pada setiap warga negara Indonesia. Karena itu masih banyak ketimpangan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara dalam mengatasi pelayanan kesehatan masyarakat.

“Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Pusat dan segenap stakeholder harus terus mempelajari dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat,” tegas Wakil Rakyat dari Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pinrang, dan Kota Palopo). ■

(as:mp). Foto: Agung/hr

# Sinergitas Pembiayaan Dibutuhkan Untuk Bangun Sarana PON Papua

Untuk menyukseskan pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua, dibutuhkan sinergitas pembiayaan antara alokasi anggaran dalam APBD dan APBN. Di sisa waktu yang tinggal 2 tahun 3 bulan ini diharapkan bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana penunjang PON.

“Kalau pembangunan infrastruktur itu minimum 1 tahun 6 bulan dalam rangka kesiapan, sehingga ini harus didorong secepatnya agar kesiapan infrastruktur maupun sarana prasarana untuk menunjang PON tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik,” kata Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena saat mengunjungi pembangunan stadium di Desa Harapan bersama Tim Komisi V DPR RI di Papua, Rabu (3/5).

Sebagaimana diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi Papua sedang membangun stadium dan sarana prasarana

penunjang lainnya untuk pelaksanaan PON XX tersebut. Berdasarkan informasi, pembangunan stadium ini akan menelan dana kurang lebih Rp10 triliun. Namun, Presiden Jokowi yang meletakkan batu pertama pembangunannya sampai saat ini belum memberikan kepastian berapa persen pemerintah pusat akan membantu.

“Untuk pembangunan beberapa venue terkait pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua ini, memang, sebagian besar yang kami dengar seperti pembangunan stadium itu dari APBD Provinsi,” jelas politisi dari

Demokrat ini. Tapi, lanjutnya, ada beberapa sarana penunjang yang harus dilengkapi oleh APBN. Misalnya, soal jalan, air bersih, normalisasi kali, dan rumah susun (rusun) yang akan dibangun untuk kepentingan akomodasi bagi kurang lebih 7.000 peserta PON itu sendiri.

Menurut informasi yang disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua yang turut mendampingi Tim Komisi V, kira-kira dibutuhkan 20 tower rumah susun yang diharapkan dibantu dari pemerintah pusat untuk akomodasi peserta PON. “Untuk itulah, kami Komisi V hadir di Papua ini untuk melihat dari dekat sejauh mana kesiapan pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua,” jelas legislator dari dapil Papua Barat ini.

Menurut informasi yang ia dengar, akan ada rapat khusus antara presiden dan kementerian terkait. “Kalau kami diikutsertakan dalam persiapan itu, karena tupoksi Komisi V mempunyai relevansi dengan kondisi ini, kami siap,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia berjanji untuk mendorong dibentuknya Peraturan Presiden (perpres) dalam aspek pembiayaan sarana dan prasarana pelaksanaan PON di Papua ini.

Ia menginformasikan, seperti ASEAN Games itu semua venue dibangun oleh Kementerian PU Pera, tapi melalui Perpres dan pembiayaannya juga jelas. Harapan Michael, apa yang dijanjikan pemerintah pusat bisa direalisasikan dengan sistem sharing. ■

(So), Foto: suci/hr



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena saat mengunjungi pembangunan stadium di Desa Harapan bersama Tim Komisi V DPR RI



## Komisi X DPR RI Optimis *Venue ASEAN Games* Rampung Tepat Waktu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah bersama Anggota Komisi X meninjau venue ASEAN Games di Palembang

Beberapa *venue* untuk *event ASEAN Games* di Kota Palembang, Sumatera Selatan, optimis bisa dirampungkan tepat waktu. Pengerjaan pembangunan dan infrastrukturnya terus dilakukan untuk mengejar waktu yang tersisa.

**D**emikian terungkap saat delegasi Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melihat dari dekat progres pembangunan beberapa *venue* di Stadion Jakabaring, Palembang, Selasa (2/5). Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah optimis Palembang mampu menjadi tuan rumah ASEAN Games tahun 2018 mendatang. Dikatakannya, Palembang masih memiliki waktu 16 bulan untuk menyelesaikan seluruh *venue* yang akan menjadi tempat pertandingan ASEAN Games.

"Kami optimis akan terselesaikan pada akhir tahun. Kami sudah melihat lapangan menembak yang sudah ada perkembangan sampai sekarang sebesar 29 persen," jelas anggota DPR RI dapil Jawa Barat XI ini.

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar tersebut berharap *venue* dicabang olahraga lainnya bisa diselesaikan pada awal tahun 2018 sekaligus bisa dilakukan *test even*. "*Test even* itu untuk melihat kesiapan cabang olahraga yang dipertandingkan. Kami yakin Pemerintah Sumatera Selatan punya semangat untuk menyelesaikan semua itu," ujarnya.

Ferdi juga meminta adanya perhatian dan pendampingan dari pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian *venue*. "Oleh karena itu, kami harap, melalui rapat dengan Kemenpora, supaya ada pendampingan secara intensif dan lebih matang dalam proses pengembangan Jakabaring," tutupnya. ■



18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
**Jakarta  
Palembang  
2018**

(rief), Foto:artief/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Australian Independent School Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/5).Foto: Jaka

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon meluncurkan buku puisi "Memeluk Waktu" di teater kecil Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Selasa (9/5) Foto: Andri



Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Fary Djemy Francis meninjau Bandara Depati Amir sekaligus mencoba simulasi penerbangan pesawat, Pangkal Pinang, Selasa (2/5). Foto: Doeh

